BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya.

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya ibarat satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan, sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Lingkungan dilihat dari sisi manusia, maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedang manusialah yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia.

Lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Lingkungan hidup dapat menyebabkan malapetaka apabila adanya eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi membawa efek positif secara ekonomi tetapi menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan umat manusia seperti kesalahan dalam pengelolaan dapat berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan sumber daya alam, termasuk kerusakan hutan lindung yang dapat mengakibatkan bencana banjir.

Timbulnya bencana banjir pada dasarnya akibat sebagian hutan menjadi gundul oleh ulah manusia, sehingga hutan tidak lagi berfungsi sepenuhnya sebagai penyerap air hujan. Lahan hutan banyak yang longsor, dan tanah longsorannya menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal. Ditambah aliran air sungai tidak lancar akibat sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, pembangunan beberapa kawasan industri diwilayah perkotaan, menyebabkan pencemaran dan meluasnya degradasi lingkungan, serta gagalnya infrastruktur dalam merekayasa lingkungan atas pembangunan dapat di rasakan jika musim hujan akan mengalami kebanjiran, sebaliknya jika kemarau akan mengalami kekeringan.

Permasalahan penanggulangan lingkungan khususnya sungai tampak semakin berat dan kompleks. Sungai sebagai sumber dari berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat, membutuhkan perhatian dari semua pemangku kepentingan, dalam penanggulangan tersebut kinerja organisasi khususnya yang ada di pemerintahan di tuntut untuk dapat bekerja dengan optimal.

Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan dukungan kesiapan organisasi yang mantap. Keberadaan otonomi daerah ini, daerah berhak mengurusi urusannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah daerah yang dapat dilihat dari kinerja organisasi yang mampu mewadahi aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.

Pemerintah akhir–akhir ini memberikan perhatian yang besar pada upaya-upaya peningkatan kemampuan kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yakni memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat sesuai perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat struktural ataupun yang bersifat fungsional. Pendidikan dan pelatihan saja tidaklah cukup, diperlukan adanya pembinaan dan motivasi kerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja organisasi yang kuat dalam rangka meningkatkan prestasinya.

Peningkatan kinerja menjadi penting mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak dan peran serta yang lebih besar bagi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dimana pemerintah beserta organisasinya lebih berperan sebagai fasilitator. Perubahan arah kebijakan ini membawa implikasi terhadap kemampuan profesionalisme suatu organisasi atau instansi dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam menghadapi persaingan ketat dengan negara – negara lain di dunia. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka peningkatan kinerja organisasi merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan.

Pembentukan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan

rehabilitasi. Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui Badan Penanggulangan Bencana baik yang berada di Pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yang disebut BPBD.

BPBD Kabupaten Bandung dibentuk atas dasar bahwa letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Bandung rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Bencana tersebut disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rangkaian bencana yang dialami Kabupaten Bandung, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari Pra bencana seperti mitigasi, kesiapsiagaan, sedangkan tanggap darurat dengan melaksanakan evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan penampungan, dan kegiatan pasca bencana dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pendirian Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung yang sebelumnya dilaksanakan oleh diantaranya

Satlak PB (Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesbanpol linmas, Satpol PP dan Bagian Sosial dalam penangulangan bencana yang ada di Kabupaten Bandung.

Salah satu bencana yang menjadi perhatian peneliti dalam penanggulangannya adalah mengenai penanggulangan bencana banjir yang tiap tahun pasti terjadi. Bencana banjir di daerah Kabupaten Bandung yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Citarum, terjadi di daerah Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Majalaya, Cicalengka dan Rancaekek, banjir terjadi akibat meluapnya air di beberapa sungai yang melintasi daerah tersebut, yaitu Sungai Cibodas, Cisangkuy, Citarik, Cimande, dan Cijalupang yang terjadi berulangkali, yaitu tahun 1931, 1964, 1992, hingga sekarang.

Wilayah bencana banjir yang dipilih oleh peneliti adalah di wilayah Kecamatan Baleendah, sebab merupakan salah satu wilayah yang sering terkena banjir di wilayah Kabupaten Bandung. Banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah diakibatkan meluapnya DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum hulu, sebagai sungai utama yang melalui daerah ini. Meluapnya sungai Citarum, selain dikarenakan tingginya curah hujan di daerah hulu sungai, juga wilayah tersebut merupakan titik pertemuan air kiriman dari daerah Majalaya dan Pangalengan. Ketinggian air pada tahun 2010 mencapai ketinggian 1.5 meter di wilayah Kecamatan Baleendah.

Dalam kondisi ini peran serta/ kinerja BPBD Kabupaten Bandung serta pihak-pihak terkait dituntut proaktif dalam penanggulangan bencana banjir terutama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang ternyata

memiliki beberapa kendala pada saat pelaksanaan penanggulangan bencana banjir tersebut yang diakibatkan oleh sebagai berikut diantaranya:

Pertama, belum adanya payung hukum atau peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, sehingga menjadi penghambat langkah BPBD secara teknis dan juga mengatur masalah seperti dana *on call*. Sehingga ketika bencana terjadi, BPBD bisa langsung memberikan bantuan.

Kedua, Kurangnya jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung, BPBD Kab. Bandung memiliki enam kepala seksi dan tiga kepala subbagian, sehingga membutuhkan sekitar dua puluh orang staf administrasi dan kurang luasnya gudang penyimpanan bantuan yang hanya berukuran 7x7 untuk tenda, mesin pompa, perahu karet, maupun peralatan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul **Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung (Suatu Studi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana produktivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir?
2. Bagaimana kualitas layanan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir?

3. Bagaimana responsivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir?
4. Bagaimana responsibilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir?
5. Bagaimana akuntabilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui produktivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Untuk mengetahui kualitas layanan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.
3. Untuk mengetahui responsivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.
4. Untuk mengetahui responsibilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.
5. Untuk mengetahui akuntabilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Kegunaan bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengalaman, wawasan dan ilmu pengetahuan di dalam penangulangan bencana banjir terutama mengenai kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan dan relevan mengenai penanggulangan bencana banjir, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi BPBD Kabupaten Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah mengenai kinerja organisasi di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.